BAB III

PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR DALAM MEMPERJUANGKAN KONSEP NEGARA RIS KE NKRI

3.1 Riwayat Hidup Muhammad Natsir

Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat. Muhammad Natsir merupakan anak ketiga dari dua pasang bersaudara. Ayahnya bernama Idris Sutan Saripado berasal dari Maninjau dan menetap di Batu Sangkar. Sedangkan ibunya bernama Khadijah berasal dari Rantau Rapat Sumatera Utara. Gelar Sutan pada orang tua Natsir bukan hanya merupakan gelar kebangsawanan keluarganya. Namun hanya merupakan gelar yang diperoleh karena tradisi setelah menikah. Sebab orang tua natsir bukan berasal dari kalangan ningrat atau bangsawan namun bersal dari masyarakat biasa. Apalagi mengingat orang tuanya juga berasal dari daerah Maninjau, di mana daerah ini merupakan daerah yang jauh dari pusat Kerajaan Pagar Ruyung Sumatera Barat. Dengan demikian sangat kecil kemungkinannya bahwa silsilah orang tua Natsir berasal dari keturunan bangsawan. Namun masyarakat Meninjau, seperti pada umumnya daerah pasisir lain, adalah masyarakat yang demokratis, terbuka, dan toleran terhadap perbedaan-perbedaan.[1]

Ayah M. Natsir merupakan seorang pegawai rendahan yang pernah menjadi juru tulis pada kantor Kontroler di Maninjau. Pada tahun 1918, ia pindahkan dari

[1] Ahmad Murjoko. *Op. Cit.,* Halm 23

Alahan Panjang ke Ujung Padang (Sulawesi Selatan) sebagai sipir (penjaga tahanan).[2]Idris yang seorang juru tulis konroler, terus mendorong anak laki-lakinya itu untuk mendalami islam. Dalam adat Minangkabau di masa itu, seorang anak laki-laki berusia 7-8 tahun, pada malam hari harus tidur di surau bersama teman-teman sebayanya. Jika seusia itu masih tidur dirumah, maka akan diejek. Rumah M. Natsir yang tidak jauh dari masjid, menyebabkan sejak usia dini ia telah menjadikan mengaji sebagai makanan sehari-hari.[3]

Dorongan ayahnya kepada M. Natsir agar giat mempelajari Islam melahirkan dampak negatif. M. Natsir kecil terdorong juga untuk mengikuti pelajaran formal. M. Natsir ingin mengikuti pendidikan di sekolah dasar *Hollandsche Inlandsche Schoolen* (HIS), yang didirikan pertama kali oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1914 untuk memberikan pendidikan dasar yang lebih maju bagi orang Cina dan kaum Bumiputra, tetapi gaji ayahnya yang Cuma seorang juru tulis, tidak cukup membiayainya bersekolah di HIS. Di masa itulah, M. Natsit sempat " menumpang" belajar di sekolah II, di kelas dua. Sekolah II artinya sekolah rakyat yang bahasa pengantarnya bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda.

Pada usianya 7-8 tuhun ini, sekolah M. Natsir sempat tak menentu, saat itu ayahnya pindah kerja dari Bonjol ke Meninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. M. Natsir mengikuti ayahnya kesana. Di Meninjau ia belajar di sekolah rakyat berbahsa Indonesia , yang di jawa dikenal dengan sekolah *Ongko Loro.* Itu pun tidak resmi, M.

[2] Roni Tabroni . *Op. Cit.,* Halm 42
[3] Lukman Hakim halm 6

Natsir belajar di sekolah tersebut tanpa membayar uang sekolah dan tidak terdaftar sebagai murid karena itu, M. Natsir sekolah sembunyi-sembunyi, jika inspektur sekolah datang, guru kelas M. Natsir meminta ia bersembunyi atau pulang duluan. Jika inspektur itu sudah pergi ia boleh balik lagi.[4]

Beberapa tokoh pergerakan mendirikan sekolah HIS partikelir di Padang untuk menampung bumi putra yang tidak diterima di sekolah pemerintah. Namanya Adabyah, sebuah sekolah Swasta yang waktu belajarnya sore hari, tidak sementereng HIS sekolah ini hanya berdinding kayu dan beratap rumbia.[5]

Tapi disini pun M. Natsir hanya bertahan beberapa bulan. Ayahnya yang dipindahkan ke Alahan Panjang membuatnya harus pindah sekolah lagi. Tapi kali ini M. Natsir sekolah di kelas II HIS Solok. Untuk itu, ia dititipkan dirumah Haji Musa, seorang saudagar. Ditempat inilah M. Natsir belajar bahasa Arab dan mengaji fiqih. Dalam uji coba sekolah di HIS, M. Natsir muda berhasil mengikuti pelajaran dengan baik bahkan melampaui prestasi kawan-kawan kelasnya

Saat M. Natsir tinggal di solok, ayahnya dipindahkan menjadi supir di Makassar, Sulawesi Selatan. Meskipun berpindah tugas sangat jauh, tetapi penghasilan ayahnya tetap seperti sedia kala.[6] Sedangkan M. Natsir tetap tinggal di Solok. Siang di HIS, sore hari M. Natsir belajar di madrasah, dan malam mengaji Al-Qur'an. Tiga tahun ia tinggal dirumah itu. Disekolah Diniyah kelas III ia terpilih

---

[4] Ibid., 43

[5] Tempo. *Politik Santun Antara Dua Rezim (Natsir).* Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). .Halm 15

[6] Lukman Hakiem. *Op. Cit.,* halm 9

menjadi guru bantu untuk kelas I. Untuk itu, ia dibayar Rp.10 (10,00 *Gulden*).[7] Tapi tidak lama di Solok, kakak M. Natsir, Uni Rabiah, memintanya kembali ke Padang. Di ibu kota Sumatera Barat itu ia di terima di kelas V HIS. Sekolah yang empat tahun lalu pernah menolaknya. Walaupun begitu, kehidupan M. Natsir di Padang memiliki ujian tersendiri. M. Natsir kecil harus mengurus keperluan hidupnya sendiri. Pada usia 11 tahun, ia mencuci dan memasak sendiri makanannya. Beban hidupnya di Padang agak ringan setelah kakak perempuannya menyusul. Meraka kemudian tinggal di dekat Pasar Gadang, Pulau Air Palinggam. Setelah lulus HIS, M. Natsir mendengar sekolah *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) Padang setingkat menengah pertama memberikan beasiswa. Syaratnya siswa harus mendapat nilai bagus dalam uji coba selama tiga-enam bulan.[8]

Antara harap dan cemas, pada tiga bulan pertama, M. Natsir belajar bersungguh-sungguh. Semua perhatian dia tumpuhkan kepada pelajaran. M. Natsir berhrap dapat melewati masa percobaan tiga bulan itu dengan baik sehingga dia bisa melanjutkan pelajaran. Pada kuartal pertama, M. Natsir meraih nilai baik untuk seluruh mata pelajaran. Seorang gurunya mengatakan, nilai yang diraih M. Natsir pada kuartal itu adalah yang terbaik di kelasnya. Dengan nilai seperti itu selain lulus masa percobaan, M. Natsir mendapat beasiswa 20, 00 *Gulden* setiap bulan dengan beasiswa sebesar itu, dapatlah M. Natsir membantu uang dapur kakaknya, dan juga untuk membeli buku, dan keperluan lain.[9]

---

[7] Tempo . *Op. Cit.,* Halm 15
[8] Roni Tabroni . *Op. Cit.,* Halm 44
[9] Lukman Hakiem. *Op. Cit.,* halm 11

Untuk mengasah kemampuan seninya, ketika di MULO M. Natsir belajar bermain biola. Selain jiwa seninya yang diasah, M. Natsir juga mengaktifkan diri di organisasi seperti kepanduan organisasi Pemuda Islam, *Jong Islamiten Bond* yang didirikan di Yogyakarta pada 1 Januari 1925. Di MULO M. Natsir untuk pertama kalinya duduk berdampingan dengan murid-murid Belanda. Di *Jong Islamiten Bond* inilah M. Natsir mengenal Nur Nahar, murid perempuan yang saat itu aktif dalam Jibda organisasi wanita Jong Islamiten Bond. Kelak Nur Nahar menjadi istri yang mendampinginya hingga akhir hayat.[10]

Setelah sekolah di MULO M. Natsir melanjutkan sekolahnya ke *Algemene Middelbare School* (AMS) di Bandung, dan lulus pada tahun 1930 dengan nilai tertinggi dan berhak memilih Fakultas Hukum di Batavia atau Fakultas Ekonomi di Rotterdam, atau menjadi pegawai negeri dengan gaji yang sangat menggiurkan. Namun ketiga hal tersebut ditolaknya. Hal ini karena M. Natsir labih tertarik pada masalah-masalah keislaman dan gerakan Islam.

Selama belajar di AMS M. Natsir juga aktif berorganisasi dan melakukan studi islam pada organisasi Persatuan Islam (Persis) yang guru utamanya adalah A. Hassan. Pada tahum yang sama, M. Natsir mengikuti kursus guru diploma *Lager Onderwijs* (LO). Selama melangsungkan studinya, M. Natsir masih tetap juga aktif di JIB Cabang Bandung. Sehingga M. Natsir konsisten dalam dunia pendidikan, yang berbasis pada ajaran Islam, maka pada tahun 1932-1942, M. Natsir mendirikan sekolah bernama Pendidikan Islam (Pendis), suatu pendidikan modern yang

[10] Roni Tabroni . *Op. Cit.*, Halm 45

mengkombinasikan kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan pesantren. dan sekaligus menjabat sebagai direkturnya selama sepuluh tahun sejak tahun 1932.[11]

M. Natsir saat muda berhubungan baik dengan A. Hassan, yang sangat dikenal di kalangan jamaah Persatuan Islam (PERSIS) sebagai guru. A. Hassan ini merupakan pria keturunan India asal Singapura yang Kemudian menjadi ahli agama di organisasi Persatuaan Islam (Persis). Ia tinggal di Bandung pada akhir 1920-an, di jalan Pakgade itulah M. Natsir kerap datang untuk menimba ilmu agama bahkan berdiskusi..[12]

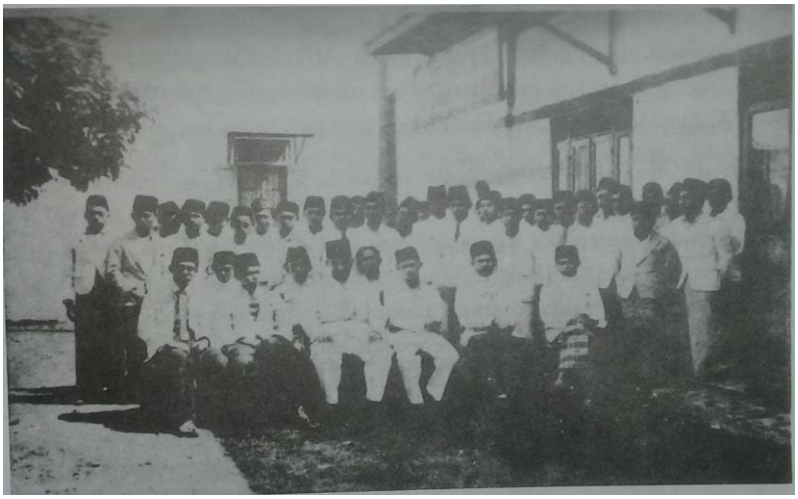

Sumber : Lukman Hakiem, halaman 25

Gambar 2.1 M. Natsir duduk paling kiri dan A. Hassan nomor dua dari kanan bersama anggota Persatuan Islam Bandung**.**

Perkenalan Natsir dengan A. Hassan bermula saat M. Natsir masih duduk di AMS, sekitaran tahun 1927. Dalam pandangan M. Natsir, A. Hassan adalah seorang

[11] Ahmad Murjoko. *Op. Cit.,* Halm 27
[12] Tempo . *Op. Cit.,* Halm 24

ulama yang berkepribadian tinggi, maupun seorang ahli debat yang tidak canggung menyampaikan pendapatnya. Atas dasar penilaiannya inilah M. Natsir muda sering berkunjung ke rumah A. Hassan di jalan Pangeran Soemedangweb, dibelakang gedung Pegadaian, Bandung. Dirumah itulah A. Hassan mencurahkan segala pemikiran dan usahanya, mulai dari membaca kitab, mengetik mendesain, mencetak hingga memasarkan buku-buku yang ditulisnya. [13]

Pertemuan dengan A. Hassan dan para tokoh Persis membuat Natsir yang awal cita-citanya untuk dapat menajadi seorang ahli Hukum, di tinggalkan. Menolak beasiswa sebesar Rp. 130 perbulan, M. Natsir lebih memilih mendirikan sekolah partikelir dengan gaji Rp. 17,50. Setelah berdiskusi dengan A. Hassan, M. Natsir merintis sebuah sekolah kecil di Jalan Lengkong Besar Nomor 16. Ia ingin membuat lembaga pendidikan Islam yang modern. Jauh dari kesan pesantren dan madrasah pada saat itu. Ia ingin menggabungkan ilmu pengatahuan umum yang diajarkan di sekolah Belanda dengan pelajaran agama Islam. M. Natsir berpendapat bahwa sistem pendidikan Islam itu, adalah ditujukan kepada manusia agar seimbang. Seimbang kecerdasan otaknya dengan keimanannya kepada Allah dan Rasul.[14]

Meski memiliki lembaga pendidikan sendiri, M. Natsir tidak melupakan Persis. M. Natsir juga mempengaruhi sistem pendidikan pesantren Persis pertama di Jalan Pajagalan, Bandung. Tidak seperti pesantren tradisional yang santrinya mengaji ramai-ramai, pesantren Persis mewajibkan santrinya masuk kelas. Di Persis, santri

[13] Lukman Hakiem. *Op. Cit.*, halm 22
[14] Roni Tabroni . *Op. Cit.*, Halm 55

setingkat SMA sudah diajar psikologi, logika Yunani, dan astronomi. M. Natsir juga memperkenalkan sistem administrasi dalam pendidikan pesantren.

Setelah menempati gedung baru yang besar dan luas, semangat M. Natsir semakin meningkat. Disusunlah program pendidikan yang lebih teratur dan lengkap, pendidikan Islam harus mempunyai empat jenjang pendidikan Taman kanak-kanak, HIS, MOLU, dan kweek School (Sekolah guru). Mendekati bulan Ramadan, M. Natsir mulai gundah. Mayoritas murid Pendidikan Islam tidak dapat membayar uang sekolah, sebab orang tua murid perlu uang untuk membeli baju lebaran. Dalam itu, para guru justru membutuhkan gaji, karena mereka juga menghadapi bulan Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri.

Dalam suasana serba sulit seperti itu, pada tanggal 30 Oktober 1934, M. Natsir menikahi Nurnahar binti Marzuki Datuk Bandaro. Upacara sakral itu dilaksanakan secara sederhana. Pengantin baru itu hidup dirumah kecil dekat *Tajug*(mushalla) di Jalan Rana. Diadakan *Walimah* (resepsi) sederhana. Karena tidak ada tempat, terpaksa para tamu di jamu makan di *tajug* kecil depan rumah. sebagai teman hidup dan teman seperjuangan, M. Natsir dan nurhanar menghadapi kenyataan hidup dengan bersama-sama. Pasangan suami Istri Natsir Nurnahar di karuniai enam anak, empat anak perempuan dan dua laki-laki.[15]

M. Natsir mendirikan lembaga pendidikan didorong oleh hasratnya untuk mencari dan menemukan sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan hakikat ajaran islam. Sistem pendidikan yang ada di benak M. Natsir ialah sistem pendidikan yang

[15] Lukman Hakiem. *Op. Cit.*, halm 49

mampu melahirkan semua yang seimbang. Seimbang ketajaman akalnya dengan kemahiran tanganya untuk bekerja. Manusia yang percaya kepada kekuatan sendiri, dan tidak bergantung kepada ijazah.

3.2 Masa Berpolitik Muhammad Natsir

M. Natsir tidak hanya di dunia agama dan intelektual saja, tetapi ia juga melebarkan sayap perjuangannya di dunia politik. Buktinya, pada tahun 1928-1932 M. Natsir terjun dalam perkumpulan *kern Lichaam Jong Islamieten Bond* (KLJIB) menjabat sebagai ketua. Dari sinilah ia bertemu dengan beberapa tokoh nasional yang bersama-sama dalam Partai Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi), yakni Mr. kasman Singodimedjo, Mr.Mohammad Roem, Prawoto Mngkusasmito dan Haji Agus Salim. Kemudian pada tahun berikutnya 1932 M. Natsir telah memimpin Organisasi Islam terkemuka di Bandung, yakni Persatuan Islam (Persis).[16] Selain itu pada tahun 1938, M. Natsir mulai aktif juga dibidang politik dengan mendaftarkan dirinya menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. M. Natsir menjabat sebagai ketua PII Bandung dari tahun 1940 samapi 1942 dan bekerja di pemerintahan sebagai kepala Biro Pendidikan kodya Bandung sampai tahun 1945.

Pada masa pendudukan jepang di Indonesia tahun 1942-1945, Jepang merangkul islam dengan itu dibentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), suatu badan federasi organisasi sosial dan organisasi politik Islam. Dalam perkembangannya selanjutnya, majelis ini berubah menjadi Majelis Syura Muslimin

[16] Ahmad Murjoko. *Op. Cit.*, Halm 32

Indonesia (Masyumi) pada tanggal 7 November 1945 dan selanjutnya mengantarkan M. Natsir sebagai salah satu ketuanya hingga partai tersebut dibubarkan.

Selanjutnya setelah kemerdekaan Indinesia pada bulan September 1945 M. Natsir menjadi anggota anggota komite Nasional Indomesia Pusat (KNIP). Pada tanggal 7-8 November 1945 beliau ikut memprakarsai kongres Umat Islam Indonesia pertama yang mengahsilkan beberapa keputusan, diantaranya Partai Msyumi adalah satu-satunya partai yang berasaskan Islam yang akan memperjuangkan aspirasi seluruh umat islam dalam lapangan politik. Dalam kongres tersebut juga disepekati bahwa satu-satunya organisasi pelajar islam adalah Pelajar Islam Indonesaia (PII), satu-satunya organisasi kepemudaan Islam adalah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan satu-satunya oraganisasi kemahasiswaan Islam adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Deselengarakannya kongres Umat Islam Indonesia dengan tujuan untuk menghadapi berbagai berbagai kemungkinan sesudah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 :[17]

1. Mempertahankan kedaulatan tanah air dengan jiwa dan darahnya.
2. Harus mempersiapkan dan menyusun tenaga-tenaga yang diperlukan untuk pembangunan negara sesuai dengan pengakuan telah merdeka yang diproklamsikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

[17] Lukman Hakim halm 52

Kongres yang diselnggarakan di tengah suasana bangsa menghadapi tentara Sekutu yang doboncengi oleh tentara Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, sepenuhnya dijiwai oleh semangat persatuan dan kesatuan umat dan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan melawan Belanda, sikap ulama, organisasi dan partai politik Islam satu suara dan tegas.

Kongres akhirnya bersepakat membentuk Partai Politik Islam Masyumi yang di ikrarkan sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik umat islam Indonesia. Catatan nama Masyumi itu bukan lagi singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia seperti zaman Jepang, melainkan sebagai kata benda. Oleh karena itu lalu disebut ” Partai Politik Islam Indonesia Masyumi”.

Satu pekan sesudah partai Msyumi terbentuk, terjadi perubahan mendasarkan dalam sistem pemerintahan RI, yakni perubahan sistem kabinet presidensial ke sistem kabinet parlementer. Perubahan sistem pemerintahan ini menyusul perubahan sistem kepartaian yang telah terjadi sebelumnya, dan pemberian wewenang yang lebih luas kepada KNIP. Dengan perubahan itu, naiklah Sjahrir menjadi Perdana Menteri. Selain menjadi perdana menteri Sjahrir merangkap sebagai Mentari dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.[18]

Pada saat Perdana Menteri Sutan Sjahrir memerlukan dukungan Islam untuk kabinetnya, dia meminta M. Natsir menajadi menteri penerangan. Bung karno yang

[18] Lukman Hakiem. *Op. Cit.*, halm 135

pernah menajadi lawa polemiknya pada tahun 1930, sama sekali tidak keberatan atas gagasan Sjahrir menunjuk M. Natsir menajadi menteri penerangan. Muhammad Hatta memberi kesaksian bahwa Bung karno selaku presiden tidak mau menndatangani sesuatu keterangan pemerintah jika bukan M. Natsir yang menyusunnya.

Namun, bersinarnya M. Natsir dalam karir politik tentu bukan kebetulan dan tiba-tiba. M. Natsir berada dipuncak pemerintahan tidak terlepas dari langkah strateginya sebagai anggota parlemen dari fraksi Masyumi mengajukan mosi pada sidang parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 3 April 1950, yang lebih dikenal dengan sebutan " Mosi Integral M. Natsir". Mosi itulah yang memungkinkan Republik Indonesia yang telah terpecah belah sebagai hasil konferensi Meja Bundar (kmb) menjadi 16 negara bagian, kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3 Pemikiran Muhammad Natsir dalam Memperjuangkan NKRI

3.3.1 Mosi Integral

Pada pertengahan 1949, Indonesia berada di tebing jurang. Republik yang baru merdeka langsung menghadapi gempuran militer dan diplomasi dari Bnelanda. Salah satu yang parah adalah dibentuknya negara-negara bagian yang tergabung dalam *Bijeenkomst voor Federal Overleg*. Bijeenkomst adalah bekas letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes van Mook. Resminya, pembentukan Bijeenkomst disebut sebagai pelaksanaan perjanjian Linggarjati 1946. Namun dengan

licikannnya membagikan negara bagian yang semestinya cuma terdiri atas Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan negara Borneo menjadi 16 negara bagian.

Akhirnya lahirlah Republik Indonesia Seriakat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949 yang menggantikan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Belanda melakukan penyerahan kedaulatan disertai pengakuan kepada Republik baru. Siasat Van Mook terbukti tidak berjalan mulus. Di Yogyakarta, Mr Asaat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Pada 4 Januari 1950, Asaat mengangkat tiga orang untuk membentuk kabinet, yakni Mr Susanto Tirtoprodjo, Muhammad Natsir dan Dr. Halim. Pokok pertama program kabinet itu berbunyi“ Melanjutkan perjuangan untuk satu negara kesatuan yang meliputi seluruh Nusantara, sebagai yg tertuang dalam Proklamasi 17 Agustus 1945”.[19]

Pada hari yang sama, negara-negara bagian lain mulai bergejolak. Kaum republiken dari barbagai pelosok negeri menyampaikan aspirasi kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan rakyat daerah malang mencetuskan resolusi untuk lepas dari Negara Jawa Timur dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Selain itu kabupaten Sukabumi mengeluarkan resolusi serupa lepas dari negara Pasunda dan bergabung dengan Republik Indonesia. Gejelok yang sama terjadi di Negara timur. Disini malah terjadi demontrasi besar-besaran disertai kekacauan yang membuat polisi harus bertindak.

[19] Tempo . *Op. Cit.,* Halm 54

Menyaksikan resolusi dan demontrasi anti-RIS, M. Natsi yang sebagai ketua fraksi Masyumi di parlemen Republik Indonesia Serikat, ia mengambil inisiatif bertukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin fraksi lain. M. Natsir segera mencapai kesepakatan dengan kasimo dari Partai katolik dan A.M Tambunan dari Partai Kristen Indonesia. Kebanyakan negara bagian rupanya berat membubarkan diri dan melebur dengan Republik Indonesia yang mereka sebut Republik Yogyakarta. Soalnya, mereka merasa sama-sama berstatus negara bagian menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.

Sepanjang dua setengah bulan, M. Natsir melakukan pembicaraan dan lobi dengan pemimpin fraksi lain untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, Muhammad Natsir berbicara dengan semua kalangan anggota RIS dari yang paling kiri seperti Ir. Sakirman utusan PKI hingga yang paling kanan. Sahetapy Engel wakil dari *Byzonder Federal Overlag* (BFO) dari pembicaraan dengan mareka maka Muhammad Natsir berkesimpulan bahwa perlu adanya penyelesaian secara menyeluruh atau integral dengan baik dalam upaya menyelesaikan persoalan bangsa waktu itu.[20] Hal ini karena beberapa kalangan BFO maupun kepala-kepala negara bagian yang dibentuk oleh Belanda berkeberatan untuk bergabung dengan Republik Indonesia (Yogyakarta) karena statusnya adalah sama-sama bagian menurut kontitusi RIS.

Atas keberatan beberapa negara bagian tersebut kemudian Muhammad Natsir mengajukan gagasan agar semua negara-negara bagian bersama-sama mendirikan

[20] Ahmad Murjoko. *Op. Cit.*, Halm 85

negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Jadi tidak ada satu negara bagian menelan negara bagian lainya. Adapun cara yang ditempuh adalah semua negara bagian sama-sama membentuk Negara Kesatuan dengan jalan semua negara bagian harus membubarkan diri masing-masing. Usul Muhammad Natsir tersebut dianggap masuk akal sehingga dengan mudah diterima oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR RIS dan sebagai komitmen atas penerimaan gagasan Muhammad Natsir tersebut maka 11 anggota DPR RIS dari berbagai fraksi memberikan dukungan tandatangan untuk diajukan dalam sidang pada tanggal 3 April 1950, Muhammad Natsir tampil di podium sidang paripurna Parlemen RIS untuk menyampaikan pidato yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir.[21]

Berkaitan dengan Mosi Integral Natsir diatas maka terkandung 2 unsur yang dijelaskan masing-masing yakni "Mosi" dan " Integral". Istilah mosi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah suatu pernyataan atau sikap seseorang dalam menyikapi lingkungan. Mosi yang diajukan Muhammad Natsir adalah bukan merupakan mosi tidak percaya pada pemerintah namun merupakan suatu dorongan pada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan negara bagian. Sedangkan Integral bearti mengaitkan eksistensi sesuatu objek dengan keseluruhan objek yang lebih luas dalam satu struktur, jadi pengintegrasian ialah tindakan menciptakan suatu kesatuan organis, utuh dan bulat, namun tidak ada bagian yang keberadaannya otonom, tersendiri lepas dari bagian-bagian lainnya.[22]

---

[21] Roni tabroni . *Op. Cit.,* Halm 149
[22] Ahmad Murjoko. *Op. Cit.,* Halm 88

Adapun dasar pertimbangan mosi integral tersebut adalah bahwa: Pertama, Proklamsi kemerdekaan Neagara Indonesia yang telah dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 adalah merpakan negara kesatuan yang ditandan tangani oleh Soekarno-Hatta sebagai atas nama bangsa Indonesia. Kedua masyarakat memberikan kepercayaan penuh keapada kedua proklamator tersebut. Ketiga pemerintah Republik Indonesia telah kembali ke ibu kota Negara Indonesia yakni pada tanggal 27 Desember 1949 setelah sebelumnya berada di Yogyakarta dari tanggal 3-4 Desember 1949.

Kempat, untuk membentuk negara baru sesudah Republik Indonesia Serikat (RIS) juga diperbolehkan menurut konstitusi RIS. Kelima, RepublikIndonesia berkebebasan membentuk daerah Renville beberapa provinsi Republik Indonesia bertipe Provincial state sebagai Pelaksanaan unitarisme desentralisasi. Keenam, bertujuan untuk menyederhanakan ketatanegraan agar menghemat keungan dan memenuhi keinginan Rakyat. Ketujuh, Mosi tersebut telah sejalan dengan peraturan Tata Tertib Konstituante Indonesia dan Kedelapan, Mosi Integral tersebut mendapat dukungan tanda tangan 11 orang anggota DPR RIS.